**PANCASILA**

**SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**

****

Oleh :

I DEWA GEDE DIRGA YASA (1705551062)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS UDAYANA

2021

# KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya.

Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Gianyar, 31 Mei 2021

Penulis

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc73385743)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc73385744)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc73385745)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc73385746)

[1.2 Rumusan Masalah 1](#_Toc73385747)

[1.3 Tujuan dan Manfaat 1](#_Toc73385748)

[1.4 Metode Penulisan 1](#_Toc73385749)

[BAB II PEMBAHASAN 2](#_Toc73385750)

[2.1 Sejarah Lahirnya Pancasila 2](#_Toc73385751)

[2.2 Perumusan Pancasila 4](#_Toc73385752)

[BAB III PENUTUP 7](#_Toc73385753)

[3.1 Simpulan dan Saran 7](#_Toc73385754)

[DAFTAR PUSTAKA 8](#_Toc73385755)

[LAMPIRAN 9](#_Toc73385756)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang lebih baik, di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pedoman dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran dan kemampuannya sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah lahirnya pancasila
2. Bagaimana perumusan pancasila

## Tujuan dan Manfaat

1. Mengetahui sejarah lahirnya pancasila
2. Mengetahui proses perumusan pancasila

## Metode Penulisan

Laporan ini disusun menggunakan metode studi literatur dari beberapa sumber misalnya artikel dari penyedia berita daring dan buku pendidikan pancasila.

# BAB II PEMBAHASAN

## Sejarah Lahirnya Pancasila

Awal kelahiran Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada saat terakhir pendudukan Fasisme Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942. Disaat tentara jepang di Asia tenggara sudah mulai terdesak oleh tentara sekutu. Tahun 1943 kekuatan tentara jepang sudah mulai rapuh, sehingga dibeberapa medan pertempuran pihak sekutu dapat memukul mundur tentara jepang dengan sangat mudahnya. Dalam kondisi yang sangat terdesak seperti ini menimbulkan jepang berubah sikap politiknya terhadap negeri-negeri yang didudukinya, termasuk terhadap bangsa Indonesia.

Jepang melancarkan politik merangkul bangsa Asia, dengan memberikan kemerdekaan kepad bangsa Birma, dan philipina dengan maksud agar kedua negeri tersebut bersedi mendukung jepang dalam menghadapi tentara sekutu. Dalam kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bangsa indonesia untuk mendesak pemerintah jepang juga memberikan kemerdekaan kepada indonesia. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan janji tersebut, pemerintahan pendudukan jepang di jawa membentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekan Indonesia (BPUPKI), yang beranggotkan 60 orang ditambah dengan 3 orang ketua yang salah satunya ada tokoh yang mewakili jepang yang bernama Iti Bangase. Dan ketua muda dijabat oleh Radjiman Wedyodiningrat dan Raden pandji Soeroso.

Dalam setiap sidang bukannya berjalan dengan mulus-mulus saja tapi mereka juga mengalami rintangan-rintangan dalam diskusinya namun dapat diselesaikan karena mereka berpegang teguh pada prinsip demi persatuan dan kesatuan dengan jiwa yang amat besar demi kepentingan bangsa dan negara.

Perdebatan terjadi antar dua golongan besar yaitu bung karno ,menyebutnya dengan golongan Nasionalis sekuler dan golongan Nasionalis muslim. Dan harus diakui bahwa sebetulnya semangat nasionalisme ini pertama kali justru muncul dari kalangan muslim (santri). Dikalangan mereka sudah timbul rasa patriotisme sejak lama yaitu sejak abad ke XVI (16) sejak kedatangan penjajah.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa kedatangan bangsa eropa ke negeri jajahannya tentu tidak lepas dari tiga motif yaitu  motif ekonomi dan bentuk eksploitasi kekayaan alm bangsa terjajah. Motif politik dalam rangka melanggengkan kekuasaan dengan politik pecah belah atau sering disebut politik *Devide et impera*.dan ketiga motif agama. Sehingga targetnya pun cukup jelas akan memerangi islam dan mengeruk kekayaan, sehingga bagi kalangan santri hal ini dianggap sangat berbahaya.

Kedua sistem pendidikan diatas maka mempengaruhi pola pikir kedua golongan tersebut.sehingga sering terjadi perbedaan sampai pada saat perumusan dasara negara. Yang termanifestasikan dalam sidang-sidang BPUPKI terutama dalam pembahasan dasar negara. Kalangan islam mengusulkan bahwa negara indonesia yang merdekaharus diletakkan pada diatas lendasan islam dengan disertai alasan bahwa mayoritas masyarakat indonesia beragama islam. Diantara yang mengusulkan hal ini adalah seorang tokoh Muhammadiyah yaituKi Bagus Hadikusumo (ketua umum Muhammadiyah) dalam  salah satu pidatonya Ki Bagus dengan penuh keyakinan mengusulkan bahwa Islam harus dijadikan dasar negara RI.

 Pihak golongan nasionalis, menyatakan bahwa negara indonesia harus diletakkan diatas dasar kebangsaan, yang oleh Supomo dapat dikatakan dapat mengatasi segala golongan dan segala orang seorang mempersatukan diri dengan lapisan rakyat seluruhnya. Dan merka berpendapat  bahwa  antara urusan agama dan urusan negara harus dipisahkan secara tegas sebagaimana seperti yang diusulkan oleh Mohammad Hatta**.** Menanggapi usulan dari golongan nasionalis tersebut, Ki Bagus Hadikusuma menangkisnya dengan telak dengan mengutif salah satu kata-kata salah seorang anggota anggota BPUPKI yang secara terang-terangan memperlihatkan ketidak setujuan terhadap usulan negara yang berdasarkan asas islam. Bahwa dulu ada yang mengatakan agama itu suci dan luhur dan tinggi sehingga agar tetap suci janganlah agama dicampurnya dengan urusan negara.

Usulan dasar negara baik yang berasal adari golongan nasionalis dan golongan islam ini berlangsung dengan perdebatan panjang sampai tanggal 1 Juni 1945. Namun sayangnya sejarah mengenai hal ini sekarang sudah mulai hilang dari peredaran sehingga sulit untuk melacaknya. Pada tanggal 1 juni 1945 tersebut Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang cukup panjang sekitar 21 halaman dihadapan sidang badan penyelidik. Dalam pidato yang kerap ditimpali dengan tepuk tangan tersebut untuk pertama kalinya ia memperkenalkan apa yang disebutPancasila sekaligus beliau menyatakan bahwa pancasila ini dapat dijadikan asas kefilsafatan.

## Perumusan Pancasila

Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Periapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI. Badan ini diketuai oleh bekas ketua Budi Utomo, yaitu dr. Radjiman Widyodiningrat. Ia didampingi oleh dua wakil ketua, masing-masing seorang berkebangsaan Indonesia dan seorang berkebangsaan Jepang. Badan ini bertujuan untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia Merdeka.

1. Sidang Pertama BPUPKI

BPUPKI mengadakan sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membicarakan dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya Mr. Muh Yamin, Prof. Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno.

1. Piagam Jakarta

Sesudah sidang pertama BPUPKI, berlangsung pertemuan di luar sidang. Pertemuan itu dilakukan oleh para anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan Islam. Dalam pertemuan itu, diupayakan kompromi antara kedua belah pihak mengenai rumusan dasar negara bagi negara Indonesia.

Pada kesempatan itu sebuah panitia, yang kemudian dikenal dengan Panitia Sembilan, dibentuk untuk merumuskan kesepakatan antara kedua belah pihak. Panitia itu beranggotakan sembilan tokoh nasional yang juga tokoh-tokoh BPUPKI, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Subardja, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakar, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, dan K.H. Agus Salim.

Setelah mengadakan pembahasan, panitia ini berhasil menetapkan Rancangan Pembukaan UUD yang kemudian di kenal dengan nama Piagam Jakarta. Pancasila dalam Piagam Jakarta dirumuskan demikian:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at-syari’at Islam bagi pemeluk-pemelukNya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Sidang Kedua BPUPKI

Ketika BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, Soekarno selaku ketua Panitia Sembilan melaporkan usul Pembukaan UUD di sidang BPUPKI. Ketua BPUPKI kemudian membentuk Panitia Perancang UUD, diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia membicarakan rancangan Pembukaan UUD. Lalu ketua membentuk Panitia Kecil beranggotakan 7 orang diketuai oleh Soepomo untuk membentuk rancangan UUD. Hasil kerja Panitia Kecil dibicarakan pada tanggal 13 Juli 1945 dan diterima oleh Panitia Perancang UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan sidang pleno BPUPKI membicarakan rancangan Pembukaan UUD dan menerimanya dengan sedikit perubahan. Pada tanggal 15 Juli 1945, dibicarakan rancangan UUD. Setelah Soekarno dan Soepomo memberikan penjelasan umum dan pasal demi pasal, masing-masing anggota memberikan tanggapan. Mengenai agama, timbul perdebatan sengit. Akan tetapi, pada tanggal 16 Juli 1945 UUD diterima dengan bulat. Dengan demikian tugas BPUPKI selesai dan badan tersebut dibubarkan.

1. Perumusan Pancasila dalam Persidangan PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terdiri atas 21 orang. Tugas PPKI adalah melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membentuk suatu negara. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan mengambil beberapa keputusan penting, yaitu:

1. Mengesahkan Pembukaan UUD
2. Mengesahkan UUD
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4. Menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional

Diantara kesepakatan mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan, terdapat satu perubahan penting, yaitu mengenai rumusan sila pertama Piagam Jakarta. Anak kalimat *“dengan kewajiban menjalankan syari’at-syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya”*disepakati untuk dihilangkan. Karena itu sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dihilangkannya anak kalimat tersebut disetujui oleh semua anggota PPKI. Itu dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa di dalam suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa sebaiknya tidak ditempatkan suatu hal yang hanya mengenai sebagian rakyat Indonesia, sekalipun bagian yang terbesar. Pencoretan anak kalimat tersebut adalah untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia

# BAB III PENUTUP

## Simpulan dan Saran

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.

# DAFTAR PUSTAKA

*Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sejarah Perumusannya*. (2020, Desember 4). Retrieved Mei 31, 2021, from kumparan: https://kumparan.com/berita-update/pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-sejarah-perumusannya-1uiQj3WDyNt/full

Lado, V. H. (2021, Februari 26). *Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Diawali BPUPKI*. Retrieved Mei 31, 2021, from tirto.id: https://tirto.id/proses-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara-diawali-bpupki-gaCX

Nugroho, F. T. (2020, September 7). *Sejarah Perumusan Pancasila dari 3 Tokoh Nasional yang Perlu Diketahui*. Retrieved Mei 31, 2021, from Bola.com: https://www.bola.com/ragam/read/4349732/sejarah-perumusan-pancasila-dari-3-tokoh-nasional-yang-perlu-diketahui

Permatasari, D. (2021, April 30). *Pancasila: Sejarah Perumusan Sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup dan Upaya Pelestarian Ideologi*. Retrieved Mei 30, 2021, from Kompas Pedia: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup-bangsa

# LAMPIRAN

|  |
| --- |
| Artikel Kumparan  Pancasila sebagai dasar negara merupakan hal yang menjadi patut dipegang teguh oleh negara Indonesia, dan juga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan kita di masa lalu. Bagaimana perjalanan perumusan Pancasila sebagai dasar negara?  Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Perumusannya  Pancasila yang berasal dari bahasa Sansekerta, panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila yang telah dirumuskan sebagai dasar negara ini juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.  Sebelum Pancasila secara sah terdiri dari lima sila yang dijadikan dasar negara dan juga pedoman hidup masyarakat Indonesia, Pancasila mengalami beberapa perubahan dalam perumusannya.  Pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat mulai merumuskan Pancasila untuk menentukan dasar negara Indonesia. Dalam sidang perumusan Pancasila tersebut terdapat beberapa ide yang tercetus. Muhammad Yamin mencetuskan Lima Dasar dalam pidatonya pada 29 Mei 1945.  Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sejarah Perumusannya (1)  Dalam ide tersebut Muhammad Yamin merumuskan lima dasar tersebut dengan Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Muhammad Yamin menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.  Ide selanjutnya dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila hingga saat ini.  Dalam pidatonya, Ir. Soekarno mencetuskan ide untuk Pancasila dengan ide Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, Kemanusiaan atau internasionalisme, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan.  Setelah merumuskan dasar negara, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang untuk kembali merumuskan dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen rumusan Pancasila sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.  Tugas yang dibebankan kepada Panitia Kecil atau Panitia Sembilan ini akhirnya disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah:  Rumusan Pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945  Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 - tanggal 18 Agustus 1945  Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949  Rumusan Keempat: Mukadimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950  Rumusan Kelima: Rumusan Pertama menjiwai Rumusan Kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi (merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959)  Demikian perjalanan panjang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan mengetahui bagaimana Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme kepada Tanah Air tercinta. |
| Artikel tirto.id  Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Siswa 2017, janji yang ditawarkan adalah Jepang akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Hal ini direalisasikan oleh Kaiso pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 62 orang. Diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat, anggota BPUPKI terdiri dari dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso, tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh orang anggota perwakilan dari Jepang. Secara garis besar, tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Maklumat yang sama memaparkan tugas BPUPKI: mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia (Asia Raya, 29 April 1945). BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Pada sidang tidak resmi, BPUPKI membahas perancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin Soekarno dan dihadiri oleh hanya 38 orang. Sidang BPUPKI I (29 Mei-1 Juni 1945) Mengutip "Sejarah Perumusan Pancasila dalam Hubungannya dengan Proklamasi" oleh Darsita, dalam sidang yang pertama, hari pertama, 29 Mei 1945 bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara. Para tokoh-tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara yang isinya berbeda-beda namun tetap memiliki persamaan yaitu didasari oleh gagasan besar bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya adalah Mohammad Yamin. Disini, ia mengemukakan bahwa dasar negara terdiri dari 5 asas yaitu: Peri Kebangsaan Peri Kemanusiaan Peri Ketuhanan Peri Kerakyatan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian, pada hari ketiga sidang pertama, 31 Mei 1945, Soepomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka adalah dengan mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini, dirumuskan dalam 5 poin yaitu: Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan lahir dan batin Musyawarah Keadilan rakyat Pada hari terakhir dari sidang pertama, 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang teman, ahli bahasa. Rumusan dasar negara dalam 5 sila tersebut, yaitu: Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau peri kemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial Ketuhanan yang berkebudayaan Sidang BPUPKI II (10-16 Juni 1945) Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Karena hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di bawah pimpinan Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes Hadikoesoemo, Wachid Hasjim, Muhammad Yamin, Abdulkahar Muzakir, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata dan Mohammad Hatta. Dalam buku "Aku Warga Negara Indonesia untuk SD/MI Kelas VI" karya Ika Kartika Sari dan Elly Malihah Setiadi disebutkan, panitia yang diberi nama Panitia Sembilan ini, dibentuk dengan tujuan merumuskan rumusan-rumusan yang telah dibicarakan agar menjadi kesepakatan yang lebih jelas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diadakan sidang kedua pada 10 Juni sampai dengan 16 Juni 1945. Setelah melewati pelbagai pertimbangan dan diskusi, pada 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh M. Yamin yang didalamnya berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Walaupun sudah dirumuskan, bukan berarti rumusan Pancasila mendapatkan kesepakatan final. Karena, belum adanya perwakilan yang representatif yang mewakili dari berbagai unsur. berakhirnya kerja BPUPKI pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 9 Agustus 1945. Diketuai Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta, PPKI bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini beranggotakan 21 orang yang semua anggotanya terdiri 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang peranakan Tionghoa. Namun tanpa sepengetahuan Jepang, Soekarno menambah 6 orang lagi, sehingga total ada 27 anggota. Setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu, disitulah Indonesia mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada 24 Agustus 1945. Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan menyesahkan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, bunyinya: Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaran/perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. |
| Artikel bola.com  Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi Bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dasar hidup bernegara. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu 'panca' yang berarti lima dan 'syla' yang berarti prinsip atau alas dasar. Di sisi lain, mungkin tak banyak yang tahu sejarah lahirnya Pancasila. Jadi, pada saat sidang BPUPKI, agendanya membahas rumusan dasar negara. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945. Saat sidang tersebut, tercetus dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Kondisi tersebut yang menjadikan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016 di Gedung Merdeka, Bandung. Di balik tercetusnya Pancasila yang menjadi dasar negara, ada tiga tokoh nasional yang turut andil dalam perumusannya. Berikut ini rangkuman mengenai rumusan Pancasila dari tiga tokoh nasional, seperti dilansir dari laman Saintif, Senin (7/9/2020).  Rumusan dasar negara oleh Mohammad Yamin  Museum Lubang Buaya  Sejumlah Pramuka mengabadikan patung tujuh pahlawan revolusi di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Selasa (29/9/2015). Pemerintah akan mengadakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober mendatang. Tokoh pertama yang mencetuskan dasar negara adalah Mohammad Yamin. Moh. Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Pada tanggal 29 Mei 1945, Moh. Yamin mengusulkan dasar negara secara lisan dengan isi sebagai berikut:  1. Peri kebangsaan  2. Peri kemanusiaan  3. Peri ketuhanan  4. Peri kerakyatan  5. Kesejahteraan rakyat  Namun, rumusan tersebut berubah saat Mohammad Yamin menyampaikan dasar negara secara tertulis. Isi rumusannya ialah:  1. Ketuhanan Yang Maha Esa  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia  3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. |